

SSTTâ€ OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SIDAK TERMINAL ARJOSARI MALANG, INI HASILNYA

Senin, 03 Juni 2019 - Sidik Aji Nugroho

KOTA MALANG - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur terjun ke Kota Malang untuk mengawasi pelayanan publik. Salah satu yang disidak Senin (3/6) adalah fasilitas umum di Terminal Arjosari Kota Malang. Dari pantauan Ombudsman, kurangnya pegawai membuat Terminal Arjosari memiliki beberapa fasilitas umum yang tidak beroperasi secara maksimal

Koordinator Tim Bidang Transportasi dan Perhubungan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur Vice Admira Firnaherera, di Terminal Arjosari saat ini cuma ada 60 sampai 65-an pegawai. "Itu masih belum ideal," tuturnya.

Di tempat yang berbeda, Koordinator Terminal Tipe A Arjosari, Hadi Supeno menambahkan bahwa seharusnya jumlah pegawainya berjumlah 114-120. "Dua kali lipat dari jumlah saat ini sebenarnya untuk Tipe A," imbuhnya.

Dampak dari kurangnya pegawai tersebut berimbas pada penilaian dari Ombudsman. Salah satunya akan adanya, ruang ibu menyusui. "Menurut Pak Hadi Supeno, ruang menyusui tidak ada karena tidak ada pegawainya dan ruangnya," ujar Vice.

Selain ruang menyusui, yang menjadi penilaian dari Ombudsman ialah posko kesehatan. Di posko tersebut memang sudah ada tempat tidur dan obat-obatan. "Namun di sana tidak ada pegawai yang menjaga," tuturnya.

Bergeser ke fasilitas rest area bagi sopir. Di fasilitas yang baru dibangun tersebut, kata Vice, memang sudah layak pakai. "Tapi itu tidak di buka 24 jam," kata Vice.

Hal tersebut disayangkan oleh pihak Ombudsman. Sebab, pembangunan rest area tersebut sudah memakai biaya negara, tapi tidak digunakan secara sepenuhnya. "Ya sebaiknya dibuka terus tidak hanya pagi saja tapi malam juga," tambah Vice.

Namun, di sisi lain, Hadi Supeno mengutarakan alasan menutup rest area supir tersebut ketika Malam. Sebab, ia mengantisipasi penumpukan bus di Terminal Arjosari. "Kan kalau tidak buka, nanti sopir-sopir ke sana (rest area) malam-malam itu," ujar Hadi.

Selain itu, lanjut dia, perlu adanya penambahan pegawai untuk menjaga rest area sopir tersebut. "Sekarang cuma dua yang jaga. Sementara kita tiga shift, jadi kurang," ujar Supeno, sapaan akrabnya.

Sidak Ombudsman terhadap faslitas umum ini digelar serentak di seluruh pemberhentian angkutan di Indonesia. Dari hasil sidak tersebut, nantinya Ombudsman akan memberikan saran yang disampaikan ke kementerian atau lembaga terkait untuk dijadikan bahan evaluasi bersama.